

**PENGARUH PDRB, INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018)**

***THE EFFEC THE INFLUENCE OF GRDP, INFLATION, RUPIAH EXCHANGE RATE AND TAXABLE ENTERPRISE TO RECEIVING VALUE ADDED TAX TAXES (Study at the Directorate General of Tax Regional Office I West Java Bandung in 2015 - 2018***

Alif Aldiat Pahala<sup>1</sup>, Muhammad Muslih S. E., MM.<sup>2</sup>

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[alifaldiat1@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:alifaldiat1@student.telkomuniversity.ac.id), [muhammadmuslih@telkomuniversity.ac.id](mailto:muhammadmuslih@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Peran dari PPN merupakan hal yang sangat penting bagi penerimaan Negara maupun daerah dimana PPN tercatat sebagai penyumbang pajak terbesar nomor dua setelah PPh. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung dimana hal tersebut membuat PPN dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Peran dari PPN sangat berhubungan dengan kegiatan konsumsi masyarakat baik itu barang atas jasa yang memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi makro suatu Negara, maka dari itu di dalam penelitian ini menggunakan variabel makro ekonomi seperti PDRB, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah.

Disamping itu ada pula peran internal dalam memkasimalkan penerimaan PPN yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti memantau dan memeriksa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk menyetor, memungut dan melaporkan PPN yang terutang. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh dari PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I pada periode 2015-2018. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder pada tahun 2015-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPP yang tercatat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Teknik Pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan aplikasi *e-views versi 10*.

Hasil Penelitian Berdasarkan Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Prob F statistik) sebesar 0.001656. Sedangkan berdasarkan hasil uji T, hasil pengujian nilai signifikansi pada variabel PDRB sebesar 0.0005, hasil pengujian nilai signifikansi pada variabel Inflasi sebesar 0.0433, hasil pengujian nilai signifikansi pada variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar 0.0725, dan hasil pengujian nilai signifikansi pada variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak sebesar 0.9827.

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan, variabel independen yang terdiri dari PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP secara simultan berpengaruh sebesar 20.04% terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I periode 2015-2018 sedangkan secara parsial PDRB dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak Berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

**Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is a tax that is imposed on domestic consumption by individual, corporate and government taxpayers. The role of VAT is very important for state and regional revenue where VAT is recorded as the second largest tax contributor after PPh. VAT is objective, not cumulative, and is an indirect tax which makes VAT transferable to other parties.*

*The role of VAT is closely related to public consumption activities both goods and services that have a relationship with the macroeconomic conditions of a country, therefore in this study using macroeconomic variables such as GRDP, Inflation, and Rupiah Exchange Rates.*

*Besides that there is also an internal role in maximizing VAT receipts performed by the Directorate General of Taxes such as monitoring and examining the Number of Taxable Entrepreneurs (PKP) who have the obligation to deposit, collect and report owed VAT. This study aimed to examine the effect of GRDP, Inflation, Rupiah Exchange Rates and Number of Taxable Entrepreneurs on Value Added Tax Receipts at the Regional Office of the Directorate General of Taxes of West Java I in the 2015-2018 period. For the data used in this study are secondary data types in 2015-2018.*

*The population in this study were all tax offices recorded at the Regional Office of the Directorate General of Taxation of West Java I. The technique for selecting samples used in this study was purposive sampling. The analytical method used in this study is panel data regression using e-views application version 10.*

*Research Results Based on the F Test shows that the significance value (Prob F statistic) is 0.001656. While based on the results of the T test, the results of testing the significance value on the GRDP variable of 0.0005, the results of the testing of the significance value on the Inflation variable were 0.0433, the results of testing the significance value on the Rupiah Exchange Rate variable were 0.0725, and the results of testing the significance value on the variable Number of Taxable Entrepreneurs were 0.9827.*

*Based on simultaneous hypothesis testing, the independent variables consisting of GRDP, Inflation, Rupiah Exchange Rate and PKP Number simultaneously affected 20.04% of Value Added Tax Receipts at the Regional Office of West Java I DGT for the period 2015-2018 while partially the GRDP and inflation had an effect positive for VAT receipts, Rupiah Exchange Rates and Number of Taxable Entrepreneurs have no effect on VAT receipts.*

*Keywords: : GRDP, Inflation, Rupiah Exchange Rates, Number of Taxable Entrepraise, Value Added Tax Receipts*

## 1. Pendahuluan

Komponen dalam APBN dihitung berdasarkan penerimaan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak, Hibah dan Bukan pajak, yang akan penulis bahas disini lebih menekankan pada pajak dalam Negeri yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan atau (BPHTB). Penerimaan pajak tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan nilai besaran persentase yang terus bertumbuh secara konstan di kisaran 12% - 17% (katadata.id, 2018).

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa penerimaan pajak secara umum tumbuh positif hingga tahun 2018 dan tercatat hingga Januari hingga November 2018. Penerimaan pajak utama terbesar berasal dari PPN sebesar 276,38 triliun, tumbuh sekitar 8,45% dan jumlah tersebut senilai dengan 28% dari total pajak, lalu disusul oleh PPh dengan 209,15 triliun atau setara dengan 21,2% dari total penerimaan pajak. Menurut UU Nomor 42 tahun 2009 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak pertambahan nilai merupakan Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam suatu daerah yang dikenakan bertingkat di setiap jalur distribusi yang dikenakan atas nilai tambah suatu komoditi dan dipungut pada setiap tahapan produksi, Perubahan perilaku konsumsi masyarakat serta ketersediaannya suatu barang memiliki hubungan terhadap PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sektor yang menyumbang pendapatan besar terhadap penerimaan.

Berdasarkan data Perkembangan Pendapatan Negara Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, menurut Kementerian Keuangan peningkatan dari PPN ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mayoritas penerimaannya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Direktorat jenderal pajak maupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penerimaan PPN setiap tahunnya diharapkan dapat selalu meningkat, akan tetapi realisasinya hal tersebut belum terwujud sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui penyebab dapat terjadinya hal tersebut.

Penelitian ini dirasa sangat penting karena peran dari PPN yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, didalam penerimaan PPN ada beberapa variabel yang mempengaruhi naik atau turunnya seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu dari empat komponen penyumbang pertambahan dari PDRB, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu Alat atau indikator yang digunakan sebagai pengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan angka dari pertumbuhan ekonomi.

Demi mendukung tercapainya penerimaan pajak maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terjadi maka indikator ekonomi makro pun harus di jaga salah satu yang akan di bahas di sini yaitu adalah Inflasi, Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus yang akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam inflasi akan terjadi penurunan tingkat pendapatan (Bambang dan Aristanti, 2014). Menurut Kementerian Keuangan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan mendorong ekonomi makro serta daya beli masyarakat ini semua berkaitan karena seluruh barang yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia merupakan barang produksi yang dikenakan PPN.

Dalam Penelitian ini Penulis ingin menganalisis hal yang menyebabkan Penerimaan dari PPN dapat melenceng dari apa yang di harapkan, dari keempat variabel seperti PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah serta jumlah PKP memiliki keterkaitan terhadap penerimaan PPN itu sendiri, penelitian ini di rasa penting karena mengingat dari berperannya PPN sebagai sumber penerimaan pajak terbesar nomor dua sebagai penyumbang APBN maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana keempat variabel diatas mempengaruhi penerimaan PPN agar nantinya negara dapat mengidentifikasi sebab tidak tercapainya atau penurunan dari penerimaan PPN dan untuk mengurangi hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan PPN serta meningkatkan sector yang dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.

Berdasarkan apa yang dijabarkan di atas, maka penulis ingin menganalisis pengaruh dari PDRB, Inflasi, Nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penelitian dengan judul "Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat pada Periode 2015-2018”.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:270) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya adari produsen terhadap konsumen. Dalam Penelitian Ini Penerimaan PPN diukur menggunakan Jumlah Penerimaan PPN setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat 1.

#### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto menurut Sukirno (2017:17), yaitu: “Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk domestik atau pendapatan regional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu.”

Metode dalam menghitung nilai PDRB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian dalam beberapa periode tertentu. Berdasarkan metode ini pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian dihitung menggunakan 4 komponen:

- konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption ( C )
- Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption ( G )
- Pengeluaran Investasi/ Investment Expenditure ( I )
- Ekspor Neto/ Net Export ( X – M )

#### 2.1.3 Inflasi

Menurut Suparmono (2018:158), Inflasi Merupakan Permasalahan ekonomi yang dapat terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang seperti Indonesia dimana itu disebabkan karena Dinamika dan perkembangan ekonomi yang berdampak pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa pada kapasitas perekonomian yang terbatas. Menurut Suparmono (2018:168), laju inflasi Pada dasarnya adalah mengukur laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya dimana itu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

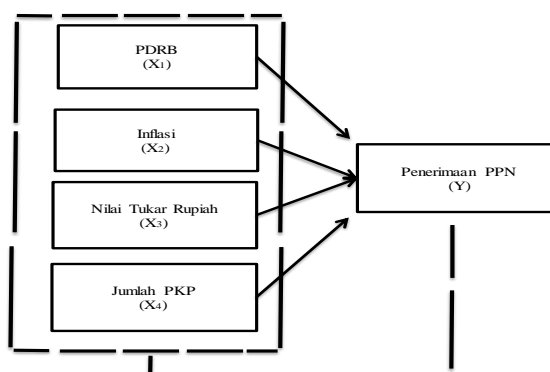
#### 2.1.4 Nilai Tukar Rupiah

Menurut Suparmono (2018:397), Nilai tukar (*exchange rate*) merupakan harga pada suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya dimana kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut sebagai apresiasi atas mata uang asing. Dalam Penelitian ini Nilai Tukar diukur menggunakan Kurs Riil untuk Barang Tunggal yang terdaftar pada situs [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing ini juga dianggap yang paling efektif ([www.inforexnews.com](http://www.inforexnews.com)).

#### 2.1.5 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:338), Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam Penelitian ini PKP diukur oleh Jumlah PKP yang terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat 1.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Keterangan:  
 Pengaruh Parsial  $\longrightarrow$   
 Pengaruh Simultan  $\dashrightarrow$

## 2 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Populasi yang digunakan adalah KPP yang terdaftar di Kantor wilayah DJP Jawa Barat I tahun 2015-2018 yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan runtut waktu (*time series*) sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data yang diperoleh sebanyak 64 yang terdiri dari 16 Kantor Pelayanan Pajak dengan periode penelitian selama empat tahun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

$\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Variabel Independen (PDRB)

X2 = Variabel Independen (Inflasi)

X3 = Variabel Independen (Nilai Tukar Rupiah)

X4 = Variabel Independen (Jumlah PKP)

e = *error term*

## 3 Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP.

**Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Keterangan	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	PDRB	Inflasi	Nilai Tukar Rupiah	Jumlah PKP
Mean	1,601,078,118,861.12	1,732,206,359.73	3.16	13,884.00	198.45
Maksimal	10,188,262,108,440.00	1,962,231,581.05	3.63	14,553.00	363
Minimal	400,859,601,619.00	1,524,974,827.42	2.73	13,503.00	114
Std. Deviasi	2,298,726,914,471.56	164,216,072.80	0.42	412.51	68.02
N	64	64	64	64	64

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Pada tabel 1, menunjukkan bahwa nilai rata-rata PDRB lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya yang berarti bahwa variabel PDRB berkelompok atau tidak bervariasi. rata rata Inflasi menunjukkan bahwa rata-rata inflasi lebih tinggi dibandingkan dari standar deviasinya yang berarti nilai inflasi berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai Tukar Rupiah menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada nilai tukar rupiah lebih tinggi

dari standar deviasinya yang berarti nilai tukar rupiah berkelompok atau tidak bervariasi. Jumlah Pengusaha Kena Pajak menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari jumlah pengusaha kena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasinya dimana dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pengusaha kena pajak berkelompok atau tidak bervariasi.

### 3.2 Analisis Data Panel

#### 3.2.1 Uji Chow

Tabel 2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	83.326057	(15,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	216.398047	15	0.0000

Sumber: Hasil output eviews versi 10, 2019

Hasil dari Uji *Chow* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa *p-value cross-section F* sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga model *fixed effect* lebih baik digunakan untuk uji signifikansi.

#### 3.2.2 Uji signifikansi Random Effect

Tabel 3. Hasil Uji signifikansi *random effect*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	84.02302 (0.0000)	2.133333 (0.1441)	86.15635 (0.0000)

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier, diperoleh nilai probabilitas cross section Breusch-Pagan sebesar 0,0000 kurang dari taraf signifikansi 5% yang artinya pengambilan keputusan H1 diterima atau penelitian menggunakan model random effect lebih baik daripada common effect. Setelah dilakukan 3 tahap pengujian, yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier ini menghasilkan model *random effect* lebih baik pada penelitian ini.

#### 3.2.3 Hasil Penelitian Model Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Uji signifikansi *random effect*



Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 03/25/20 Time: 10:00  
Sample: 2015 2018  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 16  
Total panel (balanced) observations: 64  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	1953.899	533.2427	3.664184	0.0005
INF	-3.51E+11	1.70E+11	-2.064853	0.0433
NTR	-2.19E+08	1.20E+08	-1.828399	0.0725
PKP	22622351	1.04E+09	0.021744	0.9827
C	2.36E+12	1.45E+12	1.627685	0.1089

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.01E+12	0.9815
Idiosyncratic random		2.76E+11	0.0185

Weighted Statistics			
R-squared	0.251169	Mean dependent var	1.10E+11
Adjusted R-squared	0.200401	S.D. dependent var	3.13E+11
S.E. of regression	2.80E+11	Sum squared resid	4.61E+24
F-statistic	4.947380	Durbin-Watson stat	1.736692
Prob(F-statistic)	0.001656		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.005159	Mean dependent var	1.60E+12
Sum squared resid	2.73E+26	Durbin-Watson stat	0.029335

Tabel 4. Persamaan regresi dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta (C) sebesar  $2.36E+12$  dengan tingkat probabilitas 0.1089 variabel independen yaitu PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah bernilai nol maka Pertumbuhan pada Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I  $2.36E+12$ .
- Nilai Koefisien Regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1953.899 dengan tingkat probabilitas 0.0005 kurang dari 0,05 yang berarti PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.
- Nilai Koefisien Regresi Inflasi (INF) sebesar  $-3.51E+11$  dengan tingkat probabilitas 0.0433 kurang dari 0,05 yang berarti Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.
- Nilai Koefisien Regresi Nilai Tukar Rupiah (NTR) sebesar  $-2.19E+08$  dengan tingkat probabilitas 0.0725 Lebih dari 0,05 yang berarti Nilai Tukar Rupiah Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.
- Nilai Koefisien Regresi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 22622351 dengan tingkat probabilitas 0.9827 Lebih dari 0,05 yang berarti Pengusaha Kena Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Pembahasan:

### 1. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN

Koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai sebesar 1953.899 dengan tingkat signifikansi 0.0005 kurang dari 0,05. maka  $H_{a,1}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara variabel PDRB secara parsial terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PPN, karena semakin tinggi tingkat konsumsi dan perekonomian masyarakat maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak. Hasil dari Penelitian Ini Sejalan dengan Penelitian Sania, Eva dan Ibnu (2018), yang menyatakan bahwa Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin besar juga sumber penerimaan pajak yang akan diterima.

### 2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Nilai Koefisien Regresi Variabel Inflasi memiliki nilai sebesar  $-3.51E+11$  dengan tingkat signifikansi 0.0433 kurang dari 0,05 maka  $H_{a,2}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara variabel Inflasi secara parsial terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, dimana Jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang dimana harga jual tersebut adalah dasar pengenaan Pajak (DPP) PPN. Hasil penelitian Ini Sejalan dengan Penelitian Almira, Hidayat, dan Bayu (2016), yang menyatakan Dengan meningkatnya DPP akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN oleh karena itu Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN

### 3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Nilai Koefisien Regresi Variabel Nilai Tukar Rupiah (NTR) memiliki nilai sebesar  $-2.19E+08$  dengan tingkat signifikansi 0.0725 Lebih dari 0,05 maka  $H_{a,3}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada

pengaruh negatif antara Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. yang berarti Hal ini dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang akan diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I untuk periode 2015-2018. Hasil penelitian Ini Sejalan dengan Fitri Apriyanti (2017), yang menyatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan maupun penerimaan PPN.

#### 4. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Koefisien Regresi Variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 22622351 dengan tingkat signifikansi 0.9827 Lebih dari 0,05 maka  $H_{a,4}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN. Artinya Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pemakaian jasa konsultan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat dibuat seminimal mungkin, lalu oleh pengusaha kena pajak yang membandel dengan menunggak pembayaran pajak ataupun pengusaha yang seharusnya penghasilannya sudah diharuskan dikenakan pajak tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena kurang paham dengan system perpajakan sehingga jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang akan diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I untuk periode 2015-2018. Hasil penelitian Ini Sejalan dengan tongam (2019), yang menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak yang tercatat tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya Pengusaha yang membandel dan menggunakan jasa konsultan pajak.

#### 5. Kesimpulan

- a. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan, variabel independen yang terdiri dari PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP secara simultan berpengaruh sebesar 20.04% terhadap kebijakan dividen pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I periode 2015-2018 sedangkan 79.96% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian.
- b. 3. Pengaruh secara parsial masing-masing variabel terhadap penerimaan PPN adalah sebagai berikut:
  - PDRB berpengaruh Positif terhadap Penerimaan PPN
  - Inflasi berpengaruh Positif terhadap Penerimaan PPN.
  - Nilai Tukar Rupiah Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.
  - Pengusaha Kena Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

#### Daftar Pustaka

- [1] APBN. (2019). *Perkembangan Pendapatan Negara Dari Tahun Ke Tahun* [online]. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id>.
- [2] APBN. (2019). *Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai Dari Tahun Ke Tahun* [online]. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id>
- [3] Badan Pusat Statistik. (2019). *Laju inflasi Dari Tahun Ke Tahun* [online]. Tersedia di: <https://www.bps.go.id>.
- [4] Diah, Marhamah, Sutrisno (2017). *Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. ISSN: 2085-5656, *E-Jurnal STIE SEMARANG* , Vol.9 Oktober (2017).
- [5] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang ISBN:979704-015-1.
- [6] Edalmen. (2000). *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah: Faktor Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Vol.01.
- [7] Hartini. (2018). *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal SIKAP* Vol 3 (No.1), (2018), hal 63-73 ISSN: 2541-1691
- [8] Rahayu, W. P., & Sopian, D. (2017). *Pengaruh Rasio Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Di Bursa Efek Indonesia)*. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1 No 4.
- [9] Hanum, Zulia. (2014). *Pengaruh Witholding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. *Jurnal Ilmiah Ekonmikawan* Edisi 11.
- [10] Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta. Edisi Keenam: Erlangga.
- [11] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- [12] Novi Purnama Dewi dan Moh Yudi Mahadianto (2018). *Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon*. ISSN: 2301-8879, *Jurnal Unswagati : Kajian Akuntansi* Vol.2 (2) (2018)

*Akuntansi*, 3 No 2(2460–6561).

[13] Sugioyono. (2018). *Metode analisis kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

[14] Sukardji, Untung. (2014). *Pajak Pertambahan nilai*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[15] Sukirno, Sadono. (2017). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[16] Sinambela, Tongam, Suci (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Ekuivalensi*, Vol.5 Juli (2018).

[17] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

